



PERJANJIAN KINERJA
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sally Salamah

Jabatan : Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Yusuf Ateh

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Muhammad Yusuf Ateh
NIP. 19640809 198503 1 001

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TARGET SETAHUN
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET	
				SATUAN	TOTAL
1		2		3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Fiskal Badan Usaha terhadap Keuangan Negara dan Daerah	1.1	Jumlah Badan Usaha dengan Tingkat Dukungan Fiskal terhadap Keuangan Negara dan Daerah Kategori Baik	Badan Usaha	33,00
		1.2	Persentase efisiensi biaya pada badan usaha Ekuivalen Rp2,5 T	(%) Persen	4,00
		1.3	Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat	(%) Persen	42,98
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	Badan Usaha	35,00
		2.2	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional (PSN)	33,00
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha	3.1	Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	(%) Persen	42,11
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD	4.1	Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik	(%) Persen	34,22
		4.2	Persentase BUMD dengan tata kelola korporasi baik	(%) Persen	3,96
		4.3	Persentase BUMD dengan Kinerja Sehat	(%) Persen	33,00
		4.4	Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat	(%) Persen	15,00
		4.5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan	BUMDes	2.451,00
		4.6	Jumlah BUMDes yang Berkontribusi Kepada Perekonomian Desa	BUMDes	256,00
5	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	5.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Badan Usaha	30,00
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha	6.1	Persentase K/L dengan MRI >= Level 3	(%) Persen	67,00
		6.2	Persentase K/L dengan Maturitas SPIP >= Level 3	(%) Persen	67,00
		6.3	Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	(%) Persen	67,00
		6.4	Persentase BU dengan MRI >= Level 3	(%) Persen	29,33
		6.5	Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	(%) Persen	12,24
		6.6	Persentase BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	(%) Persen	3,84
		6.7	Persentase BLU dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	(%) Persen	13,10

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET	
				SATUAN	TOTAL
1		2		3	4
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara	7.1	Nilai Skor Zona Integritas	Indeks Skala 100	77,00
		7.2	Nilai SAKIP	(%) Persen	83,00
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Deputi Bidang Unit Kerja)	(%) Persen	100,00
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Internal Deputi Bidang Akuntan Negara	Indeks Skala 100	80,00

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan Pembangunan	Rp 7.727.200.000,00
2. Dukungan Manajemen Internal	Rp 1.375.000.000,00
Jumlah	Rp 9.102.200.000,00

Pihak Kedua

Muhammad Yusuf Ateh
NIP. 19640809 198503 1 001

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN**

NO	KODE	LEVEL	SEKTOR/TEMA/ TOPIK PENGAWASAN	PERAN	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.1.d	TOPIK	Kinerja Pendidikan Tinggi	Kontributor	-	-	✓	-
2	A.1.e	TOPIK	Pemajuan Kebudayaan	Kontributor	-	-	✓	-
3	A.2.a	TOPIK	Sistem Kesehatan Nasional	Kontributor	-	✓	-	-
4	A.2.b	TOPIK	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	Kontributor	-	✓	-	-
5	A.2.c	TOPIK	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	Kontributor	-	✓	-	-
6	A.2.e	TOPIK	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	Kontributor	-	✓	-	-
7	A.2.g	TOPIK	Akuntabilitas penanganan Covid-19	Kontributor	✓	-	-	-
8	A.2.i	TOPIK	Skema Kesehatan Adaptif	Kontributor	-	✓	-	-
9	A.3.c	TOPIK	Penguatan Platform Penyaluran s.d. Pemanfaatan Bantuan Sosial	Kontributor	-	-	-	✓
10	A.3.f	TOPIK	Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Kontributor	-	-	-	✓
11	B.1.b	TOPIK	Infrastruktur SPAM	Kontributor	-	✓	-	✓
12	B.2.b	TOPIK	Infrastruktur Jalan Tol	Kontributor	-	✓	-	✓
13	B.2.c	TOPIK	Pembangunan Infrastruktur Kereta	Kontributor	-	✓	-	✓
14	B.2.d	TOPIK	Pembangunan Bandara	Kontributor	-	✓	-	✓
15	B.2.e	TOPIK	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	Kontributor	-	✓	-	✓
16	B.3.c	TOPIK	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	Kontributor	✓	-	-	-
17	B.4.a	TOPIK	Pembangunan dan Tata Kelola IKN	Kontributor	✓	✓	✓	✓
18	C.1.a	TOPIK	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran K/L	Kontributor	✓	-	-	-
19	C.1.b	TOPIK	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat	Kontributor	-	✓	-	-
20	C.1.c	TOPIK	Optimalisasi Pendapatan Negara (Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, serta PNBPN)	Kontributor	-	✓	-	-
21	C.1.d	TOPIK	Optimalisasi Pembiayaan Inovatif (Pinjaman Luar Negeri, KPBU, SWF, SBN dan SBSN)	Kontributor	-	✓	-	✓
22	C.4	TEMA	Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan	Penanggung Jawab	-	✓	-	-
23	C.4.a	TOPIK	BUMN	Penanggung Jawab	-	✓	-	-
24	C.4.b	TOPIK	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BUMD Aneka Usaha)	Penanggung Jawab	-	✓	-	-
25	C.4.c	TOPIK	BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	Penanggung Jawab	-	✓	-	-
26	C.4.d	TOPIK	BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	Penanggung Jawab	-	✓	-	-
27	C.4.e	TOPIK	BUMD (Fokus pada BUMD Aneka Usaha)	Penanggung Jawab	-	✓	-	-
28	D.2.a	TOPIK	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	Kontributor	✓	-	-	-
29	D.2.b	TOPIK	Akses Permodalan UMKM	Kontributor	✓	-	-	-
30	D.3.a	TOPIK	P3DN	Kontributor	✓	✓	✓	✓
31	D.3.c	TOPIK	Hilirisasi Industri	Kontributor	-	-	✓	-
32	D.3.d	TOPIK	Tata Kelola Industri Tambang, meliputi: Batubara (TW1), Timah (TW2), Bauksit (TW3), Nikel (TW4)	Kontributor	✓	✓	✓	✓

NO	KODE	LEVEL	SEKTOR/TEMA/ TOPIK PENGAWASAN	PERAN	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
33	D.3.f	TOPIK	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	Kontributor	-	-	✓	-
34	D.4.b	TOPIK	Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	Kontributor	✓	-	-	-
35	E.1.b	TOPIK	Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul	Kontributor	-	-	✓	-
36	E.1.c	TOPIK	Tata Kelola Pupuk Nasional	Kontributor	-	-	✓	-
37	E.1.d	TOPIK	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Kontributor	-	-	✓	-
38	E.2.a	TOPIK	Penanganan Pasca Panen	Kontributor	-	-	✓	-
39	E.2.b	TOPIK	Supply Chain Komoditas Pangan	Kontributor	-	-	✓	-
40	E.2.c	TOPIK	Kebijakan Stabilisasi Harga	Kontributor	-	-	✓	-
41	E.2.d	TOPIK	Kebijakan Ekspor/Impor Pangan	Kontributor	-	-	✓	-
42	E.3.a	TOPIK	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat	Kontributor	-	-	✓	-
43	E.3.d	TOPIK	Efisiensi Industri Pupuk Nasional	Penanggung Jawab	-	-	✓	-
44	E.3.e	TOPIK	Food Estate	Kontributor	-	✓	-	✓
45	E.3.f	TOPIK	Lambung Ikan Nasional	Kontributor	-	✓	-	✓
46	F.1.b	TOPIK	Tata Kelola Pendanaan	Kontributor	✓	-	-	-
47	F.2.a	TOPIK	Penyediaan Energi	Kontributor	-	✓	-	-
48	F.2.b	TOPIK	Pengendalian Ketergantungan Impor Energi	Kontributor	-	✓	-	-
49	F.2.c	TOPIK	Tata Kelola Cadangan Energi	Kontributor	-	✓	-	-
50	F.3.a	TOPIK	Infrastruktur Energi (produksi dan distribusi)	Kontributor	-	-	✓	-
51	F.3.b	TOPIK	Distribusi dan Pemerataan Energi	Kontributor	-	-	✓	-
52	F.4.a	TOPIK	Tata Kelola Investasi Sektor Energi	Kontributor	✓	-	-	-
53	F.4.b	TOPIK	Akuntabilitas Pembentukan Harga Energi	Kontributor	✓	-	-	-
54	F.4.c	TOPIK	Tata Kelola dan Akuntabilitas Subsidi Energi	Kontributor	✓	-	-	-
55	F.5.a	TOPIK	Transisi Menuju Energi Baru Terbarukan	Kontributor	-	-	-	✓
56	G.1.d	TOPIK	Maturitas SPIP/MRI - Kementerian/Lembaga	Kontributor	-	-	-	✓
57	G.1.f	TOPIK	Kapabilitas APIP - Kementerian/Lembaga	Kontributor	-	-	-	✓
58	G.1.g	TOPIK	Manajemen Risiko Badan Usaha	Penanggung Jawab	-	✓	-	✓
59	G.3.a	TOPIK	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	Kontributor	-	✓	-	-

Pihak Kedua

Muhammad Yusuf Ateh
NIP. 19640809 198503 1 001

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001